

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Homepage: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps
Vol. 4 No. 1, Bulan 2026, halaman: 937-948
E-ISSN: xxxx-xxxx

Akuntabilitas Guru Bimbingan dan Konseling Berbasis Data: Kajian Pustaka Tentang Model Measure

Putri Ria Angelina[1]*, Junitika Nurihsan[2], Uman Suherman[3], Yusi Riksa Yustiana[4]
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
[1]*Email penulis koresponden: putri.angelina@upi.edu

Riwayat Artikel

Submited: 23-11-2026
Accepted: 23-11-2026
Published: 24-11-2026

Abstrak

Akuntabilitas guru bimbingan dan konseling masih kerap dipahami sebagai pelaporan kegiatan, padahal tuntutan profesional menekankan bukti hasil, penggunaan data, dan komunikasi dampak layanan. Artikel ini bertujuan menyintesis konsep akuntabilitas, menjelaskan hubungannya dengan evaluasi program, mengidentifikasi hambatan penerapan, dan menelaah relevansi model enam tahap yang mencakup Mission, Element, Analyze, Stakeholder-Unite, Result, dan Educate. Kajian menggunakan pendekatan tinjauan pustaka naratif melalui seleksi purposif terhadap buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Sintesis menunjukkan bahwa akuntabilitas mencakup tanggung jawab, evaluasi, penggunaan data, keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi hasil, umpan balik, dan perbaikan program. Hambatan utama meliputi keterbatasan literasi data, beban administratif, lemahnya dokumentasi, dan dukungan kelembagaan yang belum optimal. Model enam tahap tersebut relevan sebagai kerangka penguatan akuntabilitas berbasis data, dengan syarat diterapkan secara kontekstual, sederhana, etis, dan didukung pengembangan profesional berkelanjutan.

Kata kunci: akuntabilitas guru BK; bimbingan dan konseling; MEASURE; evaluasi program; literasi data.

Abstract

School counselor accountability is still frequently understood as activity reporting, whereas professional practice increasingly requires evidence of outcomes, purposeful data use, and clear communication of service impact. This article synthesizes the concept of accountability, clarifies its relationship with program evaluation, identifies implementation barriers, and examines the relevance of a six-stage model comprising Mission, Element, Analyze, Stakeholder-Unite, Result, and Educate. A narrative literature review was conducted through purposive selection of books, scholarly articles, research reports, and policy documents relevant to school counseling accountability, program evaluation, data literacy, and professional development. The synthesis indicates that accountability includes responsibility, evaluation, data use, stakeholder involvement, communication of results, feedback, and continuous program improvement. Major barriers include limited data literacy, administrative workload, weak documentation systems, and insufficient institutional support. The six-stage model is relevant as a framework for strengthening data-based counselor accountability when it is implemented contextually, simply, ethically, and supported by continuous professional development.

Keywords: *school counselor accountability; guidance and counseling; MEASURE; program evaluation; data literacy.*

Prosiding ***Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Negeri Jakarta*** *diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta*



PENDAHULUAN

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan karena layanan yang diberikan berhubungan langsung dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier siswa. Dalam kerangka kebijakan nasional, guru BK tidak hanya dituntut mampu melaksanakan layanan, tetapi juga merancang program, menilai proses dan hasil, menyusun laporan, serta menunjukkan pertanggungjawaban profesional atas layanan yang diberikan. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 menempatkan kemampuan merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan layanan sebagai bagian dari kompetensi konselor, sedangkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 menegaskan kedudukan layanan BK sebagai bagian integral dari pendidikan dasar dan menengah. Konsekuensinya, kualitas profesi BK tidak cukup dinilai dari seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana layanan tersebut relevan dengan kebutuhan siswa, menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan, dan dapat dijelaskan kepada pemangku kepentingan.

Dalam literatur konseling sekolah, tuntutan tersebut dirumuskan melalui konsep *accountability* atau akuntabilitas. Dahir dan Stone (2003, 2009, 2011) menempatkan akuntabilitas sebagai kemampuan konselor untuk menunjukkan kontribusi program BK terhadap keberhasilan siswa dan sasaran sekolah melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Gysbers (2003) juga menunjukkan bahwa perkembangan program BK komprehensif tidak dapat dipisahkan dari evolusi akuntabilitas. Ketika sekolah semakin mengandalkan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, guru BK dituntut untuk bergerak dari paradigma *activity-oriented* menuju *result-oriented*. Perubahan ini berarti pertanyaan utama tidak lagi berhenti pada "layanan apa yang sudah dilakukan?", tetapi berkembang menjadi "perubahan apa yang terjadi pada siswa, bukti apa yang mendukung perubahan tersebut, dan bagaimana hasilnya digunakan untuk memperbaiki program berikutnya?".

Akuntabilitas menjadi penting karena keberadaan layanan BK sering berhadapan dengan masalah visibilitas. Hasil kerja guru BK tidak selalu mudah diamati secara langsung seperti nilai mata pelajaran atau produk pembelajaran. Jika layanan tidak didokumentasikan dengan indikator yang jelas dan hasilnya tidak dikomunikasikan, kontribusi BK mudah dipersepsikan secara sempit sebagai penanganan siswa bermasalah, pelaksana disiplin, atau kegiatan administratif. Penelitian di Indonesia menunjukkan masih adanya persepsi yang belum tepat terhadap fungsi BK serta hambatan dalam pelaksanaan evaluasi program (Irawan & Meylani, 2021; Dewi et al., 2023; Lilis et al., 2023). Studi mengenai akuntabilitas guru BK juga menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik, evaluasi, dokumentasi, dan komunikasi hasil masih memerlukan penguatan (Badrujaman et al., 2018; Hidayani et al., 2023).

Masalah lain terletak pada kecenderungan menyamakan akuntabilitas dengan evaluasi. Evaluasi memang menghasilkan data tentang proses dan hasil program, tetapi akuntabilitas mencakup proses yang lebih luas. Astramovich dan Coker (2007) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan jembatan menuju akuntabilitas karena memungkinkan konselor menilai efektivitas program dan mengomunikasikan temuan kepada stakeholder. Sink (2009) menegaskan perlunya konselor bertindak sebagai pemimpin akuntabilitas, sedangkan Badrujaman et al. (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya terkait kegiatan evaluasi, tetapi juga penerimaan tanggung jawab, kemampuan menjelaskan program dan hasil, menyediakan mekanisme umpan balik, dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, program yang dievaluasi belum tentu akuntabel apabila hasil evaluasinya tidak ditindaklanjuti atau tidak dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Berbagai model telah dikembangkan untuk membantu konselor melakukan evaluasi dan akuntabilitas, antara lain CIPP, *Accountability Bridge Model*, IDEAS, *evidence-based school counseling, data-driven decision making,* serta MEASURE. Di antara model tersebut, MEASURE memiliki karakteristik yang khas karena secara eksplisit menghubungkan misi sekolah, data kritis, analisis, kolaborasi *stakeholder*, hasil, dan komunikasi hasil dalam satu alur. Model ini dikembangkan oleh Dahir dan Stone sebagai akronim dari *Mission, Element, Analyze, Stakeholder-*

Unite, Result, dan Educate (Dahir & Stone, 2003, 2011). Dalam konteks sekolah yang menuntut transparansi dan pembuktian dampak, MEASURE menawarkan bahasa kerja yang relatif sederhana namun tetap berorientasi pada data dan perubahan siswa.

Di Indonesia, kajian mengenai MEASURE sudah diperkenalkan sebagai alternatif evaluasi layanan BK (Nugraha & Rohiman, 2017), sementara pemetaan riset mutakhir menunjukkan bahwa akuntabilitas konseling sekolah bergerak menuju pendekatan berbasis hasil, bukti, data, dan kolaborasi *stakeholder* (Isrofin et al., 2024). Akan tetapi, penerapan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan model. Literasi data, beban kerja, dukungan kepala sekolah, infrastruktur dokumentasi, keterampilan komunikasi hasil, dan kesempatan pengembangan profesional ikut menentukan apakah model dapat digunakan secara konsisten. Karena itu, kajian pustaka yang menghubungkan konsep akuntabilitas, evaluasi, MEASURE, hambatan implementasi, dan kebutuhan pengembangan profesional menjadi penting untuk memberikan kerangka yang lebih utuh.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) merekonstruksi konsep akuntabilitas guru BK dari perspektif profesional dan berbasis data; (2) menjelaskan hubungan sekaligus perbedaan antara evaluasi program dan akuntabilitas; (3) membandingkan beberapa model evaluasi/akuntabilitas yang relevan; (4) menganalisis model MEASURE sebagai kerangka akuntabilitas layanan BK; serta (5) merumuskan implikasi bagi pengembangan profesional guru BK dan tata kelola layanan BK di sekolah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan *narrative literature review*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian bukan menghitung ukuran efek atau melakukan meta-analisis, melainkan mengintegrasikan beragam perspektif teoretis dan temuan penelitian untuk membangun pemahaman konseptual mengenai akuntabilitas guru BK dan relevansi MEASURE. Sumber literatur meliputi artikel jurnal, buku, prosiding, hasil penelitian, serta dokumen kebijakan yang membahas akuntabilitas konseling sekolah, evaluasi program BK, *data-driven school counseling*, pengembangan profesional, dan model MEASURE.

Literatur diseleksi secara purposif berdasarkan empat kriteria: relevansi langsung dengan akuntabilitas atau evaluasi layanan BK; kontribusi terhadap pemahaman penggunaan data dan pembuktian hasil; keterkaitan dengan model-model evaluasi/akuntabilitas yang digunakan dalam konseling sekolah; serta relevansi dengan konteks pengembangan kompetensi guru BK. Karya-karya seminal seperti Dahir dan Stone, Gysbers, Astramovich dan Coker, Dimmitt dan kolega, Myrick, serta Sink digunakan untuk membangun fondasi konseptual, kemudian dipadukan dengan studi yang lebih mutakhir dan penelitian Indonesia untuk membaca konteks implementasi.

Analisis dilakukan secara tematik melalui empat tahap. Pertama, literatur dikelompokkan ke dalam tema konsep akuntabilitas, evaluasi program, model akuntabilitas, hambatan implementasi, literasi data, dan pengembangan profesional. Kedua, setiap tema dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan antarkonsep. Ketiga, temuan disintesis untuk menjelaskan posisi MEASURE dibanding model lain. Keempat, sintesis digunakan untuk merumuskan implikasi praktis dan agenda riset. Karena kajian bersifat naratif dan purposif, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai pemetaan bibliometrik yang komprehensif terhadap seluruh publikasi, melainkan sebagai sintesis konseptual yang berfokus pada isu akuntabilitas guru BK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas BK: dari pertanggungjawaban administratif menuju bukti dampak

Secara umum, akuntabilitas mengandung relasi antara pihak yang menjalankan tugas dengan pihak yang berhak meminta penjelasan atas keputusan, proses, dan hasil. Dalam konteks profesi BK, relasi tersebut melibatkan guru BK dengan siswa, kepala sekolah, guru, orang tua,

organisasi profesi, dan sistem pendidikan. Bovens (2007) menekankan bahwa akuntabilitas mengandung kewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada forum tertentu. Ketika konsep ini diterapkan pada layanan BK, pertanggungjawaban tidak cukup berupa bukti bahwa kegiatan telah berlangsung, tetapi harus mencakup alasan pemilihan program, kualitas pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta keputusan perbaikan yang diambil berdasarkan bukti.

Dahir dan Stone (2011) memberi penekanan kuat pada penggunaan data hasil siswa. Bagi mereka, akuntabilitas konselor sekolah harus dapat menghubungkan layanan dengan indikator yang penting bagi sekolah, misalnya kehadiran, disiplin, prestasi, kelulusan, atau indikator perkembangan lain yang relevan. Penekanan ini tidak berarti seluruh keberhasilan siswa dapat diklaim sebagai akibat langsung dari layanan BK. Justru akuntabilitas yang baik menuntut kehati-hatian dalam membaca hubungan antara intervensi, konteks, dan perubahan. Nilai pentingnya terletak pada kemampuan guru BK untuk menunjukkan bahwa program dirancang berdasarkan kebutuhan, memiliki indikator, dipantau, dan dianalisis secara transparan.

Myrick (2003) memandang akuntabilitas sebagai tuntutan profesi, sedangkan Badrujaman et al. (2015, 2018) mengembangkan definisi yang lebih operasional melalui unsur penerimaan tanggung jawab, komunikasi, penjelasan program dan hasil, mekanisme umpan balik, serta perbaikan program. Perspektif ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas bersifat siklik. Program yang akuntabel dimulai dari tanggung jawab terhadap kebutuhan dan tujuan, dilanjutkan dengan pelaksanaan serta dokumentasi, kemudian dievaluasi, dijelaskan kepada stakeholder, menerima umpan balik, dan diperbaiki. Dengan kata lain, akuntabilitas tidak berada pada akhir program saja, tetapi menyertai keseluruhan siklus manajemen layanan BK.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan prinsip profesionalisme guru BK yang tercermin dalam standar kompetensi konselor. Akuntabilitas juga memiliki dimensi etik karena data siswa, hasil asesmen, catatan konseling, dan laporan program harus dikelola dengan mempertimbangkan kerahasiaan, kebutuhan pihak yang menerima informasi, dan potensi dampak dari pelaporan. Karena itu, akuntabilitas tidak identik dengan membuka seluruh data secara bebas. Transparansi harus tetap berada dalam batas etika profesi dan perlindungan siswa.

Berdasarkan sintesis literatur, akuntabilitas BK dapat dirumuskan sebagai proses profesional yang memungkinkan guru BK menjelaskan dasar, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut program melalui bukti yang relevan; melibatkan stakeholder secara proporsional; serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan. Definisi ini menempatkan data bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk pembelajaran profesional dan peningkatan kualitas keputusan.

Evaluasi program dan akuntabilitas: berhubungan erat tetapi tidak identik

Evaluasi program merupakan salah satu mesin utama akuntabilitas karena menghasilkan informasi untuk menilai apakah program berjalan sesuai tujuan dan apakah perubahan yang diharapkan terjadi. Gysbers (2003) menunjukkan bahwa akuntabilitas berkembang seiring penguatan program BK komprehensif. Dimmitt (2009) menegaskan pentingnya evaluasi untuk menentukan praktik konseling sekolah yang efektif, sedangkan Astramovich dan Coker (2007) memposisikan evaluasi sebagai jembatan yang menghubungkan program dengan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Namun, menyamakan evaluasi dengan akuntabilitas menimbulkan dua risiko. Pertama, guru BK dapat merasa cukup setelah mengumpulkan data tanpa menggunakannya untuk keputusan. Kedua, evaluasi dapat berubah menjadi aktivitas teknis yang terpisah dari komunikasi, kolaborasi, dan perbaikan program. Sink (2009) menegaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan kepemimpinan; artinya konselor perlu menggunakan hasil evaluasi untuk mengadvokasi program, menjelaskan kontribusi layanan, dan mendorong perubahan sistemik. Karena itu, evaluasi adalah komponen pembentuk akuntabilitas, sedangkan akuntabilitas adalah proses yang lebih luas dan berorientasi pada pertanggungjawaban.

Model evaluasi yang tersedia memiliki fokus berbeda. CIPP menekankan pemahaman konteks, masukan, proses, dan produk untuk perbaikan program. *Accountability Bridge Model* menekankan siklus evaluasi dan komunikasi kepada stakeholder. IDEAS memberikan langkah praktis dari identifikasi pertanyaan hingga sharing hasil. *Evidence-based school counseling* mengintegrasikan praktik dengan bukti dan data. MEASURE, di sisi lain, menonjol karena secara eksplisit memulai dari misi sekolah dan data kritis, lalu berakhir pada hasil serta edukasi *stakeholder.* Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemilihan model perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan kapasitas sekolah.

Tabel 1. Perbandingan ringkas beberapa model evaluasi dan akuntabilitas BK

Model	**Fokus utama**	**Kekuatan**	**Catatan implementasi**
CIPP	Context, Input, Process, Product	Komprehensif untuk perbaikan program dan keputusan manajerial	Dapat terasa luas dan membutuhkan data pada beberapa level.
Accountability Bridge	Dua siklus: evaluasi program dan komunikasi akuntabilitas	Menegaskan hubungan evaluasi dengan stakeholder	Membutuhkan budaya komunikasi dan mekanisme umpan balik yang berjalan.
IDEAS	Identifying, Designing, Executing, Assessing, Sharing	Langkah evaluasi relatif sederhana dan mudah dipahami	Tidak sekuat MEASURE dalam mengaitkan program dengan data kritis dan misi sekolah.
Evidence-based / data-driven counseling	Penggunaan bukti dan data untuk memilih serta menilai intervensi	Mendorong keputusan berbasis bukti dan literasi data	Bergantung pada kualitas data, kemampuan analisis, dan interpretasi yang proporsional.
MEASURE	Mission, Element, Analyze, Stakeholder-Unite, Result, Educate	Mengintegrasikan misi, data, kolaborasi, hasil, dan komunikasi	Memerlukan adaptasi indikator, dukungan data, serta keterampilan komunikasi hasil.

Sumber: disintesis dari Stufflebeam (1971), Astramovich dan Coker (2007), Poynton dan Carey (2006), Dimmitt et al. (2007), serta Dahir dan Stone (2011).

MEASURE sebagai kerangka akuntabilitas berbasis data

MEASURE dikembangkan untuk membantu konselor sekolah menunjukkan dampak program melalui data yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dan tujuan sekolah. Kekuatan utama model ini terletak pada urutannya yang tidak dimulai dari instrumen evaluasi, melainkan dari misi. Artinya, guru BK terlebih dahulu perlu memahami apa yang dianggap penting oleh sekolah dan siswa, kemudian memilih data yang benar-benar relevan. Alur tersebut mencegah praktik "mengumpulkan data sebanyak-banyaknya" tanpa arah.

Mission merupakan tahap penyelarasan program BK dengan misi sekolah dan kebutuhan perkembangan siswa. Tahap ini penting karena akuntabilitas tidak dapat dibangun jika tujuan layanan berjalan terpisah dari arah strategis sekolah. Pada tahap ini, guru BK perlu menerjemahkan misi yang luas menjadi tujuan layanan yang dapat diamati dan diukur. Misalnya, jika sekolah memprioritaskan peningkatan kehadiran, iklim aman, transisi jenjang, atau kesiapan karier, program BK dapat mengidentifikasi kontribusi yang realistis terhadap prioritas tersebut.

Element mengacu pada identifikasi elemen data kritis yang akan menjadi fokus. Data kritis dapat berupa data kehadiran, keterlambatan, disiplin, keterlibatan belajar, pencapaian akademik, transisi, partisipasi, atau indikator perkembangan psikososial yang relevan. Pemilihan elemen harus mengikuti prinsip parsimoni: data yang sedikit tetapi tepat guna lebih bermanfaat daripada data yang banyak namun tidak terhubung dengan keputusan. Pada tahap ini, literasi data guru BK menjadi sangat penting.

Analyze adalah proses membaca pola, kesenjangan, kelompok yang membutuhkan perhatian, serta kemungkinan prioritas intervensi. Analisis tidak selalu harus menggunakan statistik yang kompleks. Perbandingan sebelum-sesudah, persentase capaian, distribusi kelompok, tren waktu, atau analisis sederhana berdasarkan indikator dapat memadai selama digunakan secara tepat. Mandinach dan Gummer (2016) menegaskan bahwa literasi data mencakup pengetahuan, keterampilan, dan disposisi untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna bagi keputusan. Dalam BK, kemampuan ini perlu dilengkapi dengan sensitivitas terhadap konteks siswa dan prinsip etika.

Stakeholder-Unite menekankan bahwa program BK tidak seharusnya bekerja dalam isolasi. Kolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan pihak lain diperlukan untuk memahami masalah, merancang strategi, menyediakan dukungan, dan membaca hasil secara lebih utuh. Kolaborasi juga meningkatkan peluang bahwa data dan rekomendasi BK benar-benar digunakan dalam kebijakan sekolah. Penekanan ini sejalan dengan program BK komprehensif yang menempatkan konselor sebagai bagian dari sistem pendidikan, bukan layanan periferal.

*Result a*dalah tahap pembuktian hasil. Guru BK perlu menjawab apakah intervensi menghasilkan perubahan yang diharapkan, seberapa besar perubahan tersebut, dan apakah ada penjelasan alternatif yang perlu diperhatikan. *Result* bukan sekadar menuliskan bahwa kegiatan "terlaksana dengan baik". Bukti hasil dapat berupa perubahan indikator siswa, perubahan pengetahuan atau keterampilan, peningkatan partisipasi, penurunan kejadian tertentu, atau capaian lain yang relevan dengan tujuan. Carey dan Dimmitt (2012) serta Wilkerson et al. (2013) menunjukkan pentingnya menghubungkan program konseling dengan *outcome* siswa untuk memperkuat posisi program secara empiris.

Educate adalah tahap mengomunikasikan hasil agar *stakeholder* memahami kontribusi layanan. Tahap ini sering diabaikan. Data yang sudah dianalisis dapat kehilangan nilai strategis apabila hanya tersimpan dalam dokumen internal. Edukasi *stakeholder* bukan promosi berlebihan, melainkan komunikasi yang ringkas, akurat, dan dapat dipahami tentang masalah yang ditangani, intervensi yang dilakukan, hasil yang diperoleh, keterbatasan bukti, dan rencana tindak lanjut. Dalam konteks ini, laporan satu halaman, infografik internal, presentasi rapat sekolah, dashboard sederhana, atau ringkasan program dapat menjadi sarana yang lebih efektif dibanding laporan panjang yang tidak dibaca.

Tabel 2. Operasionalisasi MEASURE dalam praktik layanan BK

Komponen	**Pertanyaan kunci**	**Contoh praktik**
Mission	Prioritas siswa dan sekolah apa yang hendak didukung layanan BK?	Menyelaraskan tujuan program BK dengan misi sekolah dan hasil need assessment.
Element	Data kritis apa yang paling relevan?	Memilih indikator seperti kehadiran, disiplin, keterlibatan, transisi, atau perkembangan psikososial.
Analyze	Apa pola dan kesenjangan yang terlihat?	Membandingkan data, mengidentifikasi kelompok prioritas, dan menetapkan fokus intervensi.
Stakeholder-Unite	Siapa yang perlu dilibatkan untuk menghasilkan perubahan?	Kolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, guru, orang tua, dan mitra terkait.

Komponen	Pertanyaan kunci	Contoh praktik
Result	Perubahan apa yang terjadi dan apa buktinya?	Membandingkan indikator sebelum-sesudah, menilai capaian, dan mendokumentasikan hasil.
Educate	Bagaimana hasil dikomunikasikan dan digunakan?	Menyusun ringkasan hasil, presentasi, dashboard sederhana, serta rekomendasi perbaikan program.

Sumber: dikembangkan dari Dahir dan Stone (2003, 2011).

Tantangan implementasi akuntabilitas guru BK

Literatur menunjukkan bahwa hambatan akuntabilitas tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan motivasi individu. Hambatan muncul pada level kompetensi, beban kerja, sistem data, budaya organisasi, dan dukungan *stakeholder*. Penelitian Indonesia mengenai evaluasi BK melaporkan keterbatasan waktu, keterampilan evaluasi, persepsi bahwa evaluasi sulit, dan kecenderungan menunda kegiatan evaluasi ketika tuntutan layanan langsung lebih mendesak (Dewi et al., 2023; Lilis et al., 2023). Situasi ini diperkuat oleh beban administratif serta jumlah siswa yang besar, sehingga guru BK lebih mudah berfokus pada penyelesaian kasus dan pencatatan minimum daripada analisis dampak.

Tantangan pertama adalah literasi data. Penggunaan data bukan sekadar memasukkan angka ke dalam tabel. Guru BK perlu mampu memilih indikator yang relevan, memahami kualitas data, membaca pola, menghindari kesimpulan yang berlebihan, dan menghubungkan temuan dengan keputusan program. Dalam praktik, kemampuan tersebut tidak selalu menjadi fokus utama pendidikan atau pelatihan guru BK. Young et al. (2014) menunjukkan adanya kesenjangan antara pelatihan konselor dan tuntutan penggunaan data dalam praktik profesional. Young dan Kaffenberger (2018) juga menekankan pentingnya proses yang membuat data dapat digunakan dan dikomunikasikan, bukan hanya dikumpulkan.

Tantangan kedua adalah kecenderungan dokumentasi berorientasi aktivitas. Ketika format pelaporan terutama meminta daftar kegiatan, jumlah peserta, atau bukti administrasi, guru BK akan terdorong memenuhi indikator proses tanpa membangun indikator hasil. Akibatnya, sekolah mengetahui bahwa layanan telah dilaksanakan, tetapi tidak memperoleh gambaran apakah layanan menjawab masalah prioritas. Perubahan *menuju result-oriented accountability* membutuhkan perubahan format pelaporan dan ekspektasi manajemen, bukan hanya perubahan perilaku guru BK.

Tantangan ketiga adalah dukungan institusional. Badrujaman et al. (2015) menunjukkan bahwa sistem manajemen dan akuntabilitas saling berkaitan. Guru BK akan kesulitan membangun sistem evaluasi apabila sekolah tidak menyediakan waktu, akses data, forum komunikasi, atau dukungan untuk tindak lanjut. Kolaborasi stakeholder juga tidak dapat dibangun hanya melalui inisiatif guru BK apabila struktur organisasi sekolah tidak memberi ruang pada layanan BK dalam pengambilan keputusan.

Tantangan keempat adalah komunikasi hasil. Data yang benar belum tentu menjadi informasi yang bermakna bagi *stakeholder*. Guru BK perlu mengubah hasil analisis menjadi pesan yang singkat, proporsional, dan relevan dengan kebutuhan audiens. Kepala sekolah membutuhkan implikasi manajerial; orang tua membutuhkan informasi yang dapat ditindaklanjuti; guru mata pelajaran membutuhkan rekomendasi kolaboratif; siswa membutuhkan umpan balik yang tidak melabeli. Tahap Educate dalam MEASURE penting karena menempatkan komunikasi sebagai bagian dari akuntabilitas, bukan pekerjaan tambahan setelah evaluasi selesai.

Tantangan kelima adalah etika dan risiko reduksionisme. Orientasi data dapat menimbulkan tekanan untuk hanya memilih indikator yang mudah diukur, padahal

perkembangan siswa juga mencakup aspek yang kompleks dan kontekstual. Rosenblad et al. (2022) mengingatkan bahwa ukuran akuntabilitas dapat menimbulkan kehilangan makna ketika aspek konseling yang sulit diukur dianggap kurang penting. Karena itu, akuntabilitas berbasis data harus menggunakan kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif, serta tetap memperhatikan tujuan perkembangan siswa secara holistik.

Pengembangan profesional: dari knowing menuju doing

Kesenjangan antara mengetahui konsep akuntabilitas dan mampu menerapkannya merupakan isu penting. Pelatihan satu arah yang berisi ceramah tentang evaluasi kemungkinan meningkatkan pengetahuan tetapi belum tentu menghasilkan perubahan praktik. Milsom dan McCormick (2015) menunjukkan bahwa pendekatan mentoring dapat memperkuat keyakinan dan praktik akuntabilitas konselor. Young et al. (2014) juga menunjukkan pentingnya pengalaman melakukan penelitian tindakan dan penggunaan data selama transisi dari calon konselor menuju praktisi. Dalam konteks Indonesia, Ardiyan et al. (2022) menekankan model pelatihan kompetensi yang kontekstual dan terintegrasi.

Prinsip transfer pelatihan menjelaskan mengapa latihan autentik diperlukan. Baldwin dan Ford (1988) menunjukkan bahwa transfer dipengaruhi oleh karakteristik peserta, desain pelatihan, dan lingkungan kerja. Guskey (2000, 2002) menekankan bahwa perubahan praktik profesional guru berkembang ketika peserta menerapkan pengetahuan baru dalam situasi nyata dan melihat hasilnya. Karena itu, pengembangan kompetensi akuntabilitas guru BK idealnya memuat analisis kebutuhan, latihan menggunakan data sekolah, penyusunan indikator, simulasi komunikasi hasil, implementasi di tempat kerja, umpan balik, dan refleksi.

MEASURE dapat digunakan sebagai struktur isi pelatihan karena keenam komponennya secara langsung memetakan kompetensi yang diperlukan. *Mission* melatih penyelarasan tujuan; *Element* dan *Analyze* melatih literasi data; *Stakeholder-Unite* melatih kolaborasi; *Result* melatih evaluasi *outcome*; dan *Educate* melatih komunikasi hasil. Jika pelatihan hanya berhenti pada definisi enam komponen, manfaatnya akan terbatas. Nilai tambah muncul ketika peserta membawa data nyata dari sekolah, mengolahnya, merancang intervensi, mencoba di lapangan, dan kembali dengan hasil untuk dianalisis serta didiskusikan.

Teknologi dapat mendukung proses ini melalui sistem dokumentasi yang sederhana. Aplikasi atau e-sistem tidak otomatis menciptakan akuntabilitas, tetapi dapat mengurangi beban administratif apabila dirancang sesuai alur kerja guru BK. Sistem yang baik seharusnya membantu pencatatan tujuan, indikator, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut tanpa memaksa duplikasi input. Penelitian tentang digitalisasi layanan BK di Indonesia menunjukkan potensi pemanfaatan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan akses data (Khasanah et al., 2022; Adawiyah & Setiawan, 2026). Namun, keberhasilan teknologi tetap bergantung pada kemudahan penggunaan, relevansi data, keamanan, dan integrasi dengan keputusan profesional.

Sintesis kajian dan agenda pengembangan di Indonesia

Sintesis literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas guru BK perlu dikembangkan sebagai ekosistem, bukan sekadar instrumen. Pada level individu dibutuhkan kompetensi merencanakan program berbasis kebutuhan, memilih indikator, menganalisis data, mengevaluasi hasil, dan mengomunikasikan temuan. Pada level program dibutuhkan siklus yang menghubungkan tujuan, data, intervensi, hasil, dan tindak lanjut. Pada level organisasi dibutuhkan dukungan kepala sekolah, akses data, waktu untuk evaluasi, forum kolaborasi, dan kebijakan pelaporan yang berorientasi pada hasil. Pada level profesi dibutuhkan standar, pelatihan berkelanjutan, contoh praktik baik, serta riset yang menguji model akuntabilitas secara empiris.

MEASURE relevan karena dapat berfungsi sebagai "arsitektur kerja" yang menghubungkan level-level tersebut. Meskipun demikian, model ini berasal dari konteks konseling sekolah Amerika Serikat sehingga adaptasi di Indonesia perlu memperhatikan sistem pendidikan, karakteristik data sekolah, beban kerja, budaya organisasi, dan terminologi layanan BK. Adaptasi bukan mengubah prinsip utama MEASURE, tetapi menerjemahkan indikator dan

prosedur agar realistis. Misalnya, elemen data kritis tidak harus selalu berupa nilai ujian; dapat berupa indikator kehadiran, kedisiplinan, keterlibatan, kesejahteraan, transisi, atau perkembangan kompetensi yang sesuai tujuan program.

Pemetaan riset Isrofin et al. (2024) menunjukkan bahwa penelitian akuntabilitas konseling sekolah semakin menekankan hasil, bukti, data, dan model aplikatif. Namun, literatur Indonesia masih membutuhkan lebih banyak studi implementasi yang menilai bukan hanya pengetahuan guru BK, tetapi perubahan perilaku di tempat kerja dan dampak pada tata kelola program. Studi eksperimental, *quasi-experimental, mixed methods*, maupun *implementation research* dapat digunakan untuk menguji faktor apa yang membuat model akuntabilitas berhasil atau gagal pada kondisi sekolah yang berbeda.

Agenda riset berikutnya juga perlu mengkaji keseimbangan antara kuantifikasi dan makna layanan. Tidak semua *outcome* konseling dapat direduksi menjadi satu angka. Karena itu, model akuntabilitas yang matang perlu menggabungkan data kuantitatif dengan bukti kualitatif, umpan balik siswa, studi kasus terpilih, dan indikator proses yang relevan. Penggunaan data harus membantu guru BK melihat siswa secara lebih utuh, bukan mengubah layanan menjadi sekadar mekanisme pencapaian indikator.

Tabel 3. Sintesis isu utama dan arah penguatan akuntabilitas BK

Isu	**Dampak terhadap akuntabilitas**	**Arah penguatan**
Literasi data terbatas	Data dikumpulkan tetapi tidak digunakan untuk keputusan	Pelatihan pemilihan indikator, analisis sederhana, interpretasi, dan visualisasi.
Pelaporan berorientasi aktivitas	Kontribusi layanan sulit dibuktikan	Ubah format laporan agar memuat tujuan, indikator, hasil, refleksi, dan tindak lanjut.
Beban administratif tinggi	Evaluasi dan dokumentasi hasil tertunda	Sederhanakan sistem pencatatan dan hindari duplikasi; gunakan dukungan teknologi yang relevan.
Kolaborasi stakeholder lemah	Data BK tidak terhubung dengan keputusan sekolah	Bangun forum rutin untuk analisis kebutuhan, tindak lanjut, dan komunikasi hasil.
Orientasi angka berlebihan	Aspek perkembangan yang kompleks dapat terabaikan	Gunakan mixed evidence: data kuantitatif, kualitatif, dan umpan balik stakeholder.
Pelatihan terlalu teoritis	Pengetahuan tidak berubah menjadi praktik	Gunakan studi kasus, data nyata, praktik di tempat kerja, mentoring, dan umpan balik.

IMPLIKASI PRAKTIS

Kajian ini memiliki beberapa implikasi bagi sekolah, guru BK, organisasi profesi, dan penyelenggara pengembangan profesional. Pertama, sekolah perlu menempatkan akuntabilitas BK sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, bukan sebagai beban dokumentasi tambahan. Indikator kinerja layanan perlu disusun bersama dan dikaitkan dengan kebutuhan siswa serta prioritas sekolah. Kepala sekolah perlu menyediakan akses data yang sesuai, waktu untuk evaluasi, dan forum untuk membahas hasil layanan.

Kedua, guru BK perlu membangun kebiasaan kerja berbasis pertanyaan. Sebelum mengumpulkan data, guru BK perlu menentukan pertanyaan akuntabilitas, misalnya: masalah prioritas apa yang ingin diubah, indikator apa yang dapat menunjukkan perubahan, intervensi apa yang diberikan, dan apa bukti hasilnya. Kebiasaan tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih fokus dan mencegah pengumpulan data tanpa tujuan.

Ketiga, pelatihan akuntabilitas perlu berbasis produk nyata. Peserta sebaiknya menghasilkan setidaknya peta misi dan tujuan, elemen data kritis, hasil analisis sederhana, rencana kolaborasi, laporan *outcome*, serta strategi komunikasi. Fasilitator perlu memberikan umpan balik pada produk tersebut dan membantu peserta mengujinya di sekolah. Pola pelatihan yang menggabungkan sesi tatap muka, praktik di tempat kerja, dan sesi refleksi kembali lebih sesuai dengan kebutuhan transfer pembelajaran dibanding pelatihan satu kali.

Keempat, digitalisasi perlu diarahkan pada simplifikasi. Sistem elektronik seharusnya mengurangi beban, bukan menambah pekerjaan. Formulir, dashboard, dan laporan otomatis perlu dibangun dari kebutuhan akuntabilitas yang nyata. Aspek keamanan data, hak akses, dan kerahasiaan konseling harus menjadi prasyarat. Teknologi baru bernilai ketika membantu guru BK mengubah data menjadi informasi dan keputusan yang lebih baik.

Kelima, komunikasi hasil perlu menjadi kompetensi eksplisit. Guru BK membutuhkan kemampuan menulis ringkasan eksekutif, menyajikan grafik sederhana, menyampaikan temuan secara lisan, dan menjelaskan keterbatasan data. Kompetensi ini penting agar *stakeholder* memahami kontribusi BK secara proporsional dan dapat memberikan dukungan terhadap tindak lanjut program.

KESIMPULAN

Akuntabilitas guru BK merupakan proses profesional yang jauh lebih luas daripada penyusunan laporan kegiatan. Akuntabilitas mencakup kesediaan menerima tanggung jawab, merancang program berdasarkan kebutuhan, menggunakan data, mengevaluasi proses dan hasil, mengomunikasikan bukti kepada *stakeholder*, membuka ruang umpan balik, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi merupakan unsur utama dalam proses tersebut, tetapi tidak identik dengan akuntabilitas karena data evaluasi baru memiliki nilai pertanggungjawaban ketika diinterpretasikan, dikomunikasikan, dan digunakan untuk keputusan.

MEASURE menawarkan kerangka yang kuat untuk mengoperasionalkan akuntabilitas melalui enam komponen: *Mission, Element, Analyze, Stakeholder-Unite, Result, dan Educate.* Keunggulannya terletak pada kemampuan menghubungkan arah strategis sekolah dengan data kritis, analisis kebutuhan, kolaborasi, pembuktian hasil, dan komunikasi dampak. Dalam konteks Indonesia, MEASURE relevan untuk membantu pergeseran dari pelaporan berbasis aktivitas menuju akuntabilitas berbasis hasil. Namun, penerapannya membutuhkan adaptasi terhadap konteks sekolah, penguatan literasi data, dukungan kelembagaan, sistem dokumentasi yang sederhana, serta pelatihan berbasis praktik dan pendampingan.

Dengan demikian, agenda penguatan akuntabilitas guru BK tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan formulir atau kewajiban laporan. Fokus utama perlu diarahkan pada pertanyaan substantif: kebutuhan siswa apa yang menjadi prioritas, intervensi apa yang dilakukan, perubahan apa yang terjadi, bukti apa yang tersedia, dan bagaimana bukti tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu layanan. Pada titik inilah akuntabilitas berfungsi bukan sebagai mekanisme kontrol administratif, melainkan sebagai sarana pembelajaran profesional dan penguatan posisi strategis BK dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, N. R., & Setiawan, A. (2026). Implementasi sistem informasi bimbingan konseling berbasis web dalam meningkatkan efektivitas layanan BK di SMP Negeri 1 Bae Kudus. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 1–8. https://doi.org/10.29040/budimas.v8i1.19082

Ardiyan, L., Milfayetty, S., Purba, S., & Lubis, M. J. (2022). Pengembangan model manajemen pelatihan peningkatan kompetensi profesional guru BK terintegrasi akun Belajar.id. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 833–844. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.446

Astramovich, R. L., & Coker, J. K. (2007). Program evaluation: The accountability bridge model for counselors. Journal of Counseling & Development, 85(2), 162–172. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2007.tb00459.x
Badrujaman, A., Furqon, F., Yusuf, S., & Suherman, S. (2015). Pengaruh model evaluasi layanan dasar berorientasi akuntabilitas terhadap peningkatan akuntabilitas guru BK SMP. PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 27(2), 158. https://doi.org/10.21009/parameter.272.08
Badrujaman, A., Luawo, M. I. R., & Cahyawulan, W. (2018). Accountability of layanan dasar by school counselor in junior high school in East Jakarta on school principals perspective. Konselor, 7(4). https://doi.org/10.24036/020187410740-0-00
Baldwin, T. T., & Ford, J. K. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel Psychology, 41(1), 63–105. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Carey, J., & Dimmitt, C. (2012). School counseling and student outcomes: Summary of six statewide studies. Professional School Counseling, 16(2), 146–153. https://doi.org/10.1177/2156759X0001600204
Dahir, C. A., & Stone, C. B. (2003). Accountability: A MEASURE of the impact school counselors have on student achievement. Professional School Counseling, 6(3), 214–221.
Dahir, C. A., & Stone, C. B. (2009). School counselor accountability: The path to social justice and systemic change. Journal of Counseling & Development, 87(1), 12–20. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2009.tb00544.x
Dahir, C. A., & Stone, C. B. (2011). School counselor accountability: A MEASURE of student success (3rd ed.). Merrill/Pearson.
Dewi, D. S., Cahyani, L., Saleh, Z., Fiah, N., Baen, S., & Badrujaman, A. (2023). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas Kota Tangerang. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 9(2), 321. https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i2.11030
Dimmitt, C. (2009). Why evaluation matters: Determining effective school counseling practices. Professional School Counseling, 12(6), 395–399. https://doi.org/10.1177/2156759X0901200605
Dimmitt, C., Carey, J. C., & Hatch, T. (2007). Evidence-based school counseling: Making a difference with data-driven practices. Corwin Press.
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Corwin Press.
Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching, 8(3), 381–391. https://doi.org/10.1080/135406002100000512
Gysbers, N. C. (2003). Comprehensive guidance and counseling programs: The evolution of accountability. Professional School Counseling, 7(1), 1–14.
Hidayani, M., Ahmad, R., & Syukur, Y. (2023). Akuntabilitas kinerja guru BK/konselor dalam menyelenggarakan layanan bimbingan klasikal di sekolah. Jurnal IKA: Ikatan Alumni PGSD UNARS, 13(1), 331–339. https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v13i1.3224
Irawan, S. I., & Meylani, H. (2021). Persepsi guru terhadap layanan bimbingan dan konseling. Satya Widya, 36(2), 88–96. https://doi.org/10.24246/j.sw.2020.v36.i2.p88-96
Isrofin, B., Taufiq, A., Ahman, A., Yustiana, Y. R., & Dudin, D. (2024). Exploring accountability in school counseling: Research trends, applied models, and implications for practice in Indonesia. KONSELOR, 13(2), 91–107. https://doi.org/10.24036/0202413281-0-86
Khasanah, L. N., Ummami, I., & Rahmawati, L. (2022). Desain aplikasi sistem informasi bimbingan konseling berbasis web di MAN 4 Jombang. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, 4(2), 371–375. https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i2.571
Lilis, L., Musyarofah, A., Naomi, D., Salamah, N., & Badrujaman, A. (2023). Keterlaksanaan dan hambatan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama.

Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(3), 1346–1354. https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.5023
Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. Teaching and Teacher Education, 60, 366–376. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011
Milsom, A., & McCormick, K. (2015). Evaluating an accountability mentoring approach for school counselors. Professional School Counseling, 19(1), 27–35. https://doi.org/10.5330/1096-2409-19.1.27
Myrick, R. D. (2003). Accountability: Counselors count. Professional School Counseling, 6(3), 174–179.
Nugraha, A., & Rohiman, I. (2017). MEASURE: Alternatif model evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling, 1(1), 67–78.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
Poynton, T. A., & Carey, J. C. (2006). An integrative model of data-based decision making for school counseling. Professional School Counseling, 10(2). https://doi.org/10.1177/2156759X0601000212
Putri, M. A., Neviyarni, N., Ahmad, R., & Syukur, Y. (2018). Guidance and counseling in school accountability. ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 1(2), 108–117. https://doi.org/10.32505/enlighten.v1i2.731
Rosenblad, N., Schaffar, B., & Löfström, E. (2022). Immeasurability loss? An analysis of the impacts of accountability measures on counselling within VET. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(2), 1–23. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.221221
Sink, C. (2009). School counselors as accountability leaders: Another call for action. Professional School Counseling, 13(2), 68–74. https://doi.org/10.5330/PSC.n.2010-13.68
Stufflebeam, D. L. (1971). The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. Annual Meeting of the American Association of School Administrators.
Wilkerson, K., Pérusse, R., & Hughes, A. (2013). Comprehensive school counseling programs and student achievement outcomes: A comparative analysis of RAMP versus non-RAMP schools. Professional School Counseling, 16(3). https://doi.org/10.1177/2156759X1701600302
Young, A., Gonzales, I., Owen, L., & Heltzer, J. V. (2014). The journey from counselor-in-training to practitioner researcher. Professional School Counseling, 18(1), 217–226. https://doi.org/10.5330/1096-2409-18.1.217
Young, A., & Kaffenberger, C. (2018). Making data work (4th ed.). American School Counselor Association.